

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (Bapusipda Jabar) yang kemudian pada tahun 2017 berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (Dispusipda Jabar) merupakan lembaga yang didirikan atas undang-undang nomor 22 tahun 1999. Pada tahun 2001 Perpustakaan Provinsi Jawa Barat yang pada awalnya merupakan instansi vertikal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di ibukota Provinsi dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian tanggal 12 April 2002, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 dibentuk Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang perpustakaan yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan.

Secara teknis Bapusipda Jabar merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan bidang perpustakaan umum dan kearsipan dengan berlandaskan perundangan yang berlaku. Berbagai fasilitas dibangun dengan tujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk belajar dengan bantuan teknologi. Terkait dengan fungsi pelestarian, tahun 2011 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 menegaskan dalam Pasal 4 bahwa penyelenggaraan arsip salah satunya harus berasaskan kearifan lokal. Prinsip ini menunjukkan bahwa kegiatan perpustakaan erat kaitannya dalam upaya melestarikan nilai-nilai lokal masyarakat.

Nilai kearifan lokal dalam sudut pandang teoritis dinyatakan sebagai “Gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya” (Sartini, 2004, hlm. 11). Sedangkan Rahawarin (2012) dari hasil risetnya mengungkapkan “Tidak ada salahnya semua daerah di Indonesia menghidupkan kembali budaya-budaya lokal dan bentuk bentuk khas kearifan lokal, karena ternyata bisa

difungsikan sebagai alat perekat masyarakat, dengan berbagai perbedaanya”. Kedua definisi tersebut menunjukkan pentingnya pelestarian nilai-nilai lokal karena memuat gagasan bersifat lokal dan bijaksana yang kemudian difungsikan sebagai alat perekat masyarakat. Karya lokal merupakan karya yang sangat berguna bagi masyarakat karena dimanfaatkan untuk tujuan berbagai aktivitas keilmuan seperti kebutuhan pembelajaran, penelitian dan sarana pelestarian untuk generasi berikutnya.

Menyambung urgensi pengelolaan dan pemanfaatan nilai-nilai lokal bagi masyarakat, diperkuat oleh Capel (2014, hlm. 64) yang mengatakan bahwa “Pengetahuan tentang kepribumian (lokal) dapat digunakan untuk mengubah pola utama masyarakat seperti produksi dan konsumsi untuk membantu pembangunan berkelanjutan di negara berkembang”. Karakteristik tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dan multikultural. Kemudian Nuraini dalam skripsinya (2015) menunjukkan “Interaksi dan bentuk kearifan lokal tersebut memberi dampak positif terhadap kelestarian sumberdaya hutan yang dikelola oleh masyarakat adat Dayak Iban”. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana nilai lokal berfungsi sebagai pengambilan keputusan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan.

Contoh aplikasinya ialah pengelolaan hutan yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan situasi sosial masyarakat pribumi, terbukti dengan sistem pengelolaan yang tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan mengingat prinsip kearifan lokal masyarakat. Interaksi tersebut memiliki nilai informasi yang dapat dilestarikan melalui pendokumentasian kebudayaan. Tujuannya untuk menjaga nilai informasi lokal, sehingga ketika dibutuhkan oleh generasi mendatang dapat dengan mudah ditemukan. Apabila merujuk ketersediaan koleksi perpustakaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koleksi muatan lokal seyogyanya relevan dengan kebutuhan masyarakat penggunanya (pemustaka). Konsep relevan sendiri bertujuan untuk menyesuaikan nilai informasi dengan kebutuhan pemustaka dalam pengambilan keputusan.

Berbicara mengenai pemustaka, maka pustakawan idelanya mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna potensial maupun aktual daripada koleksi

muatan lokal itu sendiri. Dari penjabaran sebelumnya diketahui bahwa koleksi muatan lokal memiliki kandungan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan masyarakat. Dalam sudut pandang ketersediaan koleksi, orientasi kebutuhan mengindikasikan tugas pustakawan tidak terbatas pada penyimpanan saja, tetapi mampu mengembangkan dan mendayagunakan kepada pemustaka secara berkala.

Sudut pandang lain dilihat dari kebutuhan informasi masyarakat mengenai informasi lokal dipaparkan melalui artikel berikut:

Travel Community mengungkapkan informasi mengenai eksistensi budaya lokal Tanjungsari dalam <http://travel.detik.com> (2011) membahas beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Mulai dari reruntuhan benteng, meriam kuno, mesjid, rumah adat, atau kompleks pemakaman. Satu fakta yang menarik adalah kurangnya informasi tentang peninggalan sejarah tersebut. Jangan heran apabila seorang warga menggelengkan kepala dan terdiam saat ditanya cerita tentang mesjid kuno di depan rumahnya. Tidak jarang kami harus berkeliling kampung untuk mencari orang paling tua dengan harapan mereka masih ingat cerita lama tentang sebuah makam batu di alun alun kampung.

Pembahasan di atas menunjukkan fakta kurangnya informasi masyarakat mengenai budaya lokal. Kondisi tersebut idealnya menjadi perhatian perpustakaan umum sebagai lembaga informasi yang meliputi fungsi kultural (pelestarian budaya lokal). Dalam hal ini, perpustakaan seyogyanya memperhatikan kelengkapan koleksi muatan lokal yang bernilai informasi tentang masyarakat di sekitarnya. Tujuan utamanya ialah memberikan peluang kepada pemustaka untuk memperoleh informasi spesifik tentang potensi, budaya, sejarah, kesenian dan aspek lokal lainnya. Dengan koleksi muatan yang lengkap menunjukkan kekayaan perpustakaan umum dalam menghimpun muatan lokal daerah tersebut. Sebagai refleksi mengenai kondisi perpustakaan umum daerah dalam mengelola informasi lokal terdapat dalam penelitian mengenai “Pengelolaan Koleksi *Local Content* (Muatan Lokal): Studi Kasus Koleksi Khusus Jakarta di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta” sebagai berikut:

Agrestin (2011, hlm. 78) menyimpulkan bahwa pengelolaan koleksi khusus Jakarta di BPAD Provinsi DKI Jakarta ini belum baik. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) tidak adanya kebijakan secara tertulis mengenai pengelolaan koleksi khusus Jakarta dan bagaimana pengembangan selanjutnya; (2) masih adanya koleksi yang belum melalui proses pengolahan tetapi sudah dilayankan dan koleksi belum terdaftar di katalog (OPAC); dan

(3) upaya pelestarian koleksi seperti suhu ruang penyimpanan yang panas men jadi kendala bagi pelestarian koleksi.

Kondisi demikian menjabarkan perpustakaan umum sebagai lembaga yang mengelola koleksi muatan lokal masih tergolong “belum baik”, disebabkan oleh kendala konseptual maupun teknis, seperti kebijakan, pengolahan, dan upaya pelayanannya kepada masyarakat pengguna. Penjabaran Agrestin pun mengindikasikan pula pentingnya pustakawan untuk memperhatikan faktor kemutakhiran koleksi muatan lokal sebagai sumber informasi pemustaka. Misalnya pada penggunaan OPAC, idelanya dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk melayani koleksi kepada pemustaka. Merujuk konsep perpustakaan umum yang melayani seluruh masyarakat, maka kemutakhiran pun mengindikasikan bahwa pustakawan mampu menyediakan koleksi terbaru (*up to date*) dan dilengkapi fasilitas mutakhir. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat terkini.

Kedudukan perpustakaan sebagai lembaga informasi memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya lokal melalui ketersediaan koleksi muatan lokal. Kondisi tersebut dipertegas melalui pernyataan bahwa “Perpustakaan sebagai sebuah lembaga organisasi informasi diharapkan menjadi tempat strategis bagi masyarakat dalam perolehan informasi. Pada era Global sekarang pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin meningkat pula jumlah informasi yang dibutuhkan masyarakat” (Wulan, 2016). Pernyataan sebelumnya mengindikasikan bahwa perpustakaan sangat dituntut berperan aktif dalam mengembangkan berbagai macam informasi melalui ketersediaan koleksi muatan lokal yang memuat informasi kedaerahan.

Selain itu, menyinggung dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global menjadi kekhawatiran sendiri terhadap nilai-nilai tradisional masyarakat yang mulai terkikis modernisasi. Kondisi ini diproyeksikan semakin parah apabila tidak adanya usaha terencana dari perpustakaan untuk melestarikan budaya lokal. Secara konstitusi, perpustakaan umum diwajibkan untuk melakukan pelestarian nilai budaya lokal melalui ketersediaan koleksi,

karena tujuan utama ketersediaan koleksi untuk memenuhi kebutuhan pemustakanya.

Isu pelestarian budaya lokal melalui perpustakaan pada dasarnya merupakan implementasi fungsi kultural perpustakaan, khususnya perpustakaan umum daerah kota/kabupaten dan provinsi. Selanjutnya penjabaran fungsi kultural yang dimaksud ialah:

Perpustakaan menyimpan khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada serta juga mengikatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya melalui proses penyediaan bahan bacaan. Penyediaan bacaan khususnya perpustakaan umum, dapat berupa bacaan bersifat rekreasi-kultural atau kegiatan lain seperti seni pertunjukan, boneka atau aktivitas kerajinan tangan melalui kerjasama dengan pihak luar (Sulistyo-Basuki, 2011, hlm. 1.23-1.24).

Berkaca dari pernyataan Sulistyo-Basuki mengenai fungsi kultural mendeskripsikan tugas perpustakaan untuk melaksanakan pelestarian budaya bangsa atau masyarakat setempat (lokal). Kegiatan pelestarian budaya tersebut secara teknis dilakukan melalui ketersediaan koleksi (bahan bacaan) bersifat rekreatif-kultural, yaitu koleksi yang memiliki nilai informasi kebudayaan (kultural). Kebudayaan yang dimaksud ialah nilai informasi kedaerahan (lokal). Selain itu, tindak lanjut melalui koleksi ialah mendayagunakan kepada masyarakat pengguna melalui program bercerita, kesenian dan bentuk apresiasi budaya yang lainnya. Terintegrasinya nilai-nilai lokal dalam ketersediaan koleksi muatan lokal merupakan upaya perpustakaan umum untuk menghargai nilai identitas yang secara turun temurun diakui sebagai kesatuan dan pedoman bagi masyarakat. Konsep tersebut mutlak dilakukan secara berkesinambungan oleh perpustakaan melalui pengembangan, pendayagunaan dan pelayanan koleksi muatan lokal kepada pengguna.

Senada dengan ketersediaan koleksi muatan lokal di perpustakaan umum, Koswara dkk. (1998, hlm. 12) memberikan gambaran tujuan perpustakaan umum yaitu “Melayani seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan fasilitas bagi kepentingan pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya”. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa perpustakaan umum idealnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan kebutuhan informasi

yang beragam. Dalam melayankannya kepada pemustaka, idealnya ketersediaan koleksi dapat memadai dan memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, sehingga unsur penting ketersediaan koleksi yaitu bagaimana koleksi muatan lokal dapat didayagunakan informasinya oleh pemustaka.

Undang-undang (UU) No. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 mengartikan perpustakaan umum sebagai “Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status”. Kemudian pada pasal 22 ayat dua berbunyi: “Pemerintah kabupaten menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat”. Menganalisis bunyi pasal-pasal pada undang-undang No. 43 Artinya UU No. 43 tahun 2007 memberikan arahan yang cukup jelas kepada perpustakaan umum untuk melakukan pelestarian budaya daerah melalui pengembangan dan pendayagunaan koleksi muatan lokal.

Merujuk regulasi berikutnya yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang selanjutnya disebut undang-undang deposit pada tanggal 9 Agustus 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang No.4 Tahun 1990. Undang-undang deposit ini mewajibkan “Penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa eksemplar karya mereka kepada instansi terkait”. Lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan undang-undang tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di Ibukota Negara untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penghimpunan, penyimpanan dan pelestarian serta pendayagunaan semua karya cetak dan rekam yang dihasilkan di daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah di setiap Ibu Kota Provinsi dan sebagai hasil dari pengumpulan karya tersebut maka terciptalah koleksi deposit.

Implementasi fungsi kultural di Dispusipda Jabar dilihat melalui ketersediaan koleksi muatan lokal pada Ruang Literatur tentang Jawa Barat Lt. 2 dan 7. Berdasarkan studi pendahuluan pada 28 September 2016 bersama Ibu Teti

dari bidang pelayanan umum dan Ibu Umi Kulsum dari bidang Deposit Pengolahan Bahan Perpustakaan (DBPB) diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Aspek Studi Pendahuluan

Aspek	Sub-Aspek	Keterangan		Catatan
		Ada	Tidak	
<i>Papper</i>	Dokumen pengadaan koleksi muatan lokal dari penerbit/penulis	√		-
	Dokumen pengadaan koleksi muatan lokal dari pembelian	√		-
	Dokumen pengadaan koleksi muatan lokal dari hadiah/hibah	√		-
	Koleksi muatan lokal yang dialihmediakan ke digital	√		-
	Dokumen daftar judul koleksi muatan lokal baik digital atau tercetak	√		-
	Dokumen perawatan koleksi muatan lokal baik digital atau tercetak		√	-
	Dokumen yang memuat daftar pengguna muatan lokal	√		-
	Ruang khusus pengelolaan muatan lokal	√		Ruang Literatur Tentang Jawa Barat
	Label yang menunjukkan koleksi muatan lokal	√		-
	Tempat khusus penyimpanan koleksi muatan lokal Jawa Barat yaitu lemari, rak, layanan, dan sebagainya	√		Contoh: terdapat beberapa rak bersubyek sejarah yang disusun per kabupaten dan label untuk koleksi langka

Aspek	Sub-Aspek	Keterangan		Catatan
		Ada	Tidak	
	Tempat khusus perawatan muatan lokalyaitu lemari, rak, layanan, dan sebagainya		√	-
<i>People</i>	Struktur organisasi pengelolaan muatan lokal		√	Sementara berada pada bidang Deposit Pengolahan Bahan Perpustakaan(DPBP)
	Pengelola khusus koleksi muatan lokal	√		
	Pengembangan sumber daya manusia		√	Sarjana Ilmu Perpustakaan
	Pengguna koleksi muatan lokal	√		-
Program	Program pemanfaatan koleksi muatan lokal	√		Seni tari, pantun bahasa Sunda, Ngamumule Literatur Jawa Barat dan <i>Story Telling</i> Bahasa Sunda -

Sumber: Hasil Studi Pendahuluan Peneliti (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pustakawan Dispusipda Jabar terintegrasi untuk melakukan ketersediaan koleksi muatan lokal yang dilayankan pada Ruang Literatur tentang Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia, dokumen dan program yang mendukung ketersediaan koleksi muatan lokal. Pada tahun 2015 koleksi muatan lokal memiliki rincian jumlah sebagai berikut: (1) monograf berjumlah 10.410 judul/satuan; (2) koleksi hasil implementasi UU. No. 4 Tahun 1990 berjumlah 4.992 judul/satuan; (3) koleksi langka berjumlah 625 judul/satuan; (4) majalah berjumlah 714 judul/satuan; (5) jurnal berjumlah 723 judul/satuan; (6) hasil penelitian

Nuryaman, 2017

KETRSEDIAAN KOLEKSI MUATAN LOKAL DALAM MEMENUHI FUNGSI KURTUSAL PERPUSTAKAAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Skripsi/Thesis/Disertasi/Lap. Penelitian berjumlah 3441 judul/satuan; (7) kartografis berjumlah 17 judul/satuan; (8) karya Rekam berjumlah 978 judul/satuan; (3) dan refleksi alat-alat tradisional berjumlah 11 judul/satuan.

Ketersediaan koleksi tersebut merupakan perwujudan Dispusipda Jabar memenuhi fungsi kultural. Merujuk pada konsep ketersediaan koleksi di perpustakaan, maka pustakawan sebagai senantiasa memperhatikan ketersediaan koleksi muatan lokal dari aspek relevansi, orientasi kebutuhan pengguna, kelengkapan dan kemutakhirannya. Selain itu, hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa: (1) lokasi ruang koleksi muatan lokal yang kurang strategis; (2) jumlah pemustaka yang menggunakan koleksi sedikit; (3) kondisi ruangan masih dalam tahap persiapan (pasca pindah koleksi dari Jl. Soekarno Hatta) dan (4) kurangnya sumber daya manusia. Mengingat ketersediaan koleksi muatan lokal di Dispusipda Jabar, idealnya dapat dimanfaatkan pemustaka sebagai sarana memenuhi kebutuhan pemustaka guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pengetahuan lokal Jawa Barat.

Pada dasarnya setiap fungsi perpustakaan bergantung pada ketersediaan koleksi. Misalnya fungsi penyimpanan, yang disimpan ialah koleksi, fungsi informasi yang digunakan sebagai sumber informasi ialah koleksi, begitupun dengan fungsi kultural yang ditunjang oleh ketersediaan koleksi muatan lokal. Akan tetapi, kondisi lapangan menunjukkan bahwa pemustaka koleksi masih sedikit, sehingga menjadi sebuah kesenjangan antara ketersediaan koleksi muatan lokal dengan kebutuhan pemustaka. Tanpa adanya pemustaka yang menggunakan koleksi muatan lokal, maka perpustakaan tidak dapat menjalankan fungsi kultural secara optimal. Oleh karena itu, dengan metode kualitatif deskriptif direncanakan penelitian “Ketersediaan Koleksi Muatan Lokal dalam Memenuhi Fungsi Kultural Perpustakaan (Studi Kualitatif Deskriptif pada Ruang Literatur tentang Jawa Barat di Dispusipda Jabar)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian secara umum yaitu bagaimana ketersediaan koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan?. Sedangkan pertanyaan penelitian secara khusus meliputi:

- 1) Bagaimana relevansi koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan?
- 2) Bagaimana orientasi kebutuhan koleksi muatan lokal pada pengguna dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan?
- 3) Bagaimana kelengkapan koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan?
- 4) Bagaimana kemitakhiran koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum ialah mendeskripsikan ketersediaan koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan. Sedangkan tujuan secara khusus meliputi:

- 1) Mendeskripsikan relevansi koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan.
- 2) Mendeskripsikan orientasi kebutuhan koleksi muatan lokal pada pengguna dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan.
- 3) Mendeskripsikan kelengkapan koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan.
- 4) Mendeskripsikan kemitakhiran koleksi muatan lokal dalam memenuhi fungsi kultural perpustakaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah:

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang baru di bidang perpustakaan dan informasi khususnya mengenai koleksi muatan lokal. Dimana pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk karya tulis selanjutnya dan pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan.

1.4.2 Praktis

- 1) Sebagai bahan evaluasi ketersediaan koleksi muatan lokal pada ruang literatur tentang Jawa Barat Dispusipda Jabar dalam memenuhi fungsi kultural.
- 2) Sebagai konsep dasar dalam melakukan praktek pengembangan koleksi muatan lokal dan pemanfaatannya.
- 3) Memberikan kesadaran kepada pihak perpustakaan dan masyarakat pribumi mengenai pentingnya kedudukan koleksi literatur tentang Jawa Barat sebagai warisan budaya lokal.
- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kebudayaan lokal sebagai identitas masyarakat pribumi Kota Bandung dan Jawa Barat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 BAB dengan berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini meliputi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan manfaat penelitian berdasarkan kepada fokus penelitian serta stuktur organisasi dari penulisan skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini meliputi kajian pustaka atau landasan teoritis yang ditinjau dari berbagai sumber rujukan tercetak maupun *online* untuk mendukung penulisan penelitian ini. Kajian pustaka berkaitan dengan fokus permasalahan yaitu konsep ketersediaan koleksi, konsep koleksi muatan lokal, konsep pengetahuan lokal dan konsep fungsi kultural perpustakaan. Kemudian disertakan penelitiann relevan dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan pemaparan hasil temuan dan pembahasan yang didapatkan peneliti sesuai dengan pertanyaan penelitian dan kajian pustaka.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini meliputi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian. Hal ini terkait dengan topik penelitian dan pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada pendahuluan.